



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 85 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 82);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2019 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2019.

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;

Bab III : Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;

Bab V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

- a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
- b. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
- d. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
- e. Rencana Kerja Badan Daerah;
- f. Rencana Kerja Dinas Daerah;
- g. Rencana Kerja Kantor Daerah; dan
- h. Rencana Kerja Kecamatan.

(2) Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:

- a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(3) Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.

Terdiri atas:

- a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
- c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
- e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
 - m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
 - o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
 - p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan;
 - r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.
- (4) Rencana Kerja Kantor Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (5) Rencana Kerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
- a. Rencana Kerja Kecamatan Srandakan;
 - b. Rencana Kerja Kecamatan Sanden;
 - c. Rencana Kerja Kecamatan Pajangan;
 - d. Rencana Kerja Kecamatan Sedayu;
 - e. Rencana Kerja Kecamatan Pandak;
 - f. Rencana Kerja Kecamatan Kasihan;
 - g. Rencana Kerja Kecamatan Bantul;
 - h. Rencana Kerja Kecamatan Bambanglipuro;
 - i. Rencana Kerja Kecamatan Kretek;
 - j. Rencana Kerja Kecamatan Pundong;
 - k. Rencana Kerja Kecamatan Sewon;
 - l. Rencana Kerja Kecamatan Jetis;
 - m. Rencana Kerja Kecamatan Imogiri;
 - n. Rencana Kerja Kecamatan Dlingo;
 - o. Rencana Kerja Kecamatan Pleret;
 - p. Rencana Kerja Kecamatan Banguntapan; dan
 - q. Rencana Kerja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

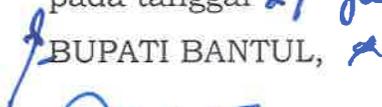
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 27 juli 2018

BUPATI BANTUL, 


SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 27 juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 85

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 85 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2019

**DINAS PERTANAHAN
DAN TATA RUANG**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2019

Perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk APBD 2019 telah diawali dengan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun dengan mengacu pada RPJMD provinsi dan mengacu pada RPJMN.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RKPD dan Renstra Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran disertai dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya yang disusun berdasarkan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk itu Renja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul tahun 2019 ini disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya; pemecahkan masalah yang dihadapi; dan berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Acuan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019 menggunakan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang **Tahun 2017 – 2021** dan **RKPD Tahun 2019** yang disesuaikan dengan tugas pokok fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Program dan kegiatan dijabarkan dalam matrik yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2019 merupakan:

- a. Pedoman bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019.
- b. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- d. Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2019.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010;
- f. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2019.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2019 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2019. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah menyesuaikan gambaran

tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2019 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan tugas dan fungsinya;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN SISTEMATIKA

Penyajian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk perencanaan pembangunan tahun 2019, perangkat daerah memerlukan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD Organisasi Perangkat Daerah tahun 2017 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2018. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang pada tahun 2017 terdapat 5 Program dan 17 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 98,941%.. Semua program capaian yang diraih 100 % pada Program Penataan, Pengawasan , Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan capaian terendah tahun 2017 yaitu 99,98%. Perkiraan capaian tahun 2018 diharapkan lebih baik dibanding dengan tahun 2017 dengan 8 program dan 24 kegiatan.

Adapun pelaksanaan kegiatan dan hasil pencapaian tahun 2017 diurutkan sesuai program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Kegiatan : Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 183.772.000,00
Realisasi Anggaran : Rp. 169.082.368,00 (92,007 %)
Tingkat Capaian : Terlaksananya kegiatan dengan pembayaran honorarium pengelola keuangan dan kepegawaian 12 bulan, pembelian ATK , alat listrik dan elektronik, Meterai 795 lembar, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, pembayaran langganan telepon 12 bulan, air 11 bulan, listrik 12 bulan, surat kabar 2 eksemplar 12 bulan, belanja jasa kir 1 unit kendaraan, belanja cetak, penggandaan dan

pembayaran makan minum rapat.21 kali rapat

2) Kegiatan : Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan konsultasi

Alokasi Anggaran : Rp. 109.582.700,00

Realisasi Anggaran : Rp. 87.919.797,00 (80,231 %)

Tingkat Capaian : Terlaksananya kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan konsultasi dengan terbayarnya biaya perjalanan sebanyak 9 kali perjalanan dinas dalam daerah, 12 kali perjalanan dinas luar daerah dan rapat koordinasi sebanyak 64 kali rapat.

3) Kegiatan : Penyediaan Jasa Pengelola Perkantoran

Alokasi Anggaran : Rp. 142.900.000

Realisasi Anggaran : Rp. 140.785.000 (98,52 %)

Tingkat Capaian : Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Perkantoran dengan terbayarnya honor tenaga kontrak sebanyak 12 bulan sebanyak 6 personil

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 125.000.000,00

Realisasi Anggaran : Rp. 123.082.500,00 (98,466 %)

Tingkat Capaian : Terlaksananya kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor dengan terwujudnya rehab 1 unit gedung logistik

2) Kegiatan : Pengadaan/Rehabilitasi kendaraan dinas / operasional

Alokasi Anggaran : Rp. 93.000.000

Realisasi Anggaran : Rp. 85.901.000 (92,367)

Tingkat Capaian : Terlaksananya kegiatan Pengadaan/Rehabilitasi kendaraan dinas /operasional dengan terlaksananya pembelian 6 unit kendaraan roda 2.

3) Kegiatan Pengadaan peralatan dan perlengkapan

Alokasi Anggaran : Rp. 10.000.000

Realisasi Anggaran : Rp. 8.590.100 (89,600)

Tingkat Capaian : Terlaksananya kegiatan Pengadaan peralatan dan perlengkapan dengan terbayarnya pembelian 1(satu) buah kursi putar dan 2 unit IPAD

4) Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 38.138.300

Realisasi Anggaran : Rp35.454.000 (92,962)

Tingkat Capaian : Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor dengan terbayarnya pemeliharaan gedung berupa pengecatan dan pemeliharaan lainnya.

5) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

Alokasi Anggaran : Rp. 38.138.300

Realisasi Anggaran : Rp35.454.000 (97,834%)

Tingkat Capaian : Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional dengan terpeliharanya pemeliharaan kendaraan dinas sejumlah 6 unit kendaraan roda 4 dan 13 unit kendaraan roda 2 dengan 56 kali servis/penggantian suku cadang dan pembelian BBM.

6) Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Alokasi Anggaran : Rp31.767.200

Realisasi Anggaran : Rp26.176.000 (82,399%)

Tingkat Capaian : Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan dengan terpeliharanya peralatan kantor dengan service peralatan kantor sejumlah 42 kali

c. Program Perencanaan Tata Ruang

Program ini pada tahun 2017 hanya terdapat 1 (satu) yaitu Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang

1) Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang

Alokasi anggaran : Rp1.100.000.000

Realisasi anggaran : Rp1.025.579.497,00. (93,234%)

Tingkat capaian : pengadaan jasa konsultansi

- a) RDTR dan Peraturan Zonasi Kecamatan Bambanglipuro;
- b) RDTR dan Peraturan Zonasi serta Kecamatan Dlingo;
- c) KLHS Kecamatan Bambanglipuro
- d) KLHS Kecamatan Dlingo
- e) Penyusunan Raperda RDTR dan PZ Piyungan
- f) Penyusunan Raperda RDTR dan PZ Pansela
- g) Penyusunan Raperda RDTR dan PZ Jetis
- h) Penyusunan Raperda RDTR dan PZ Pundong
- i) Desain Citra Kota Bantul Jalan Jendral Sudirman

Hasil dari kegiatan ini bermanfaat sebagai instrumen *advice planning* operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

d. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Program ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp231.000.000,00 dengan 1 kegiatan.

1) Kegiatan Penyusunan Kebijakan pengendalian Pemanfaatan Ruang

Alokasi anggaran : Rp231.000.000,00

Realisasi anggaran : Rp204.123.985,00 (84,413)

Tingkat capaian :

- a) Kajian Platform Layanan Dinas
- b) Kajian Kematangan Masyarakat
- c) Aplikasi Broadcast
- d) Pengawasan yang tertangani sebanyak 545 bidang

e. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

1) Kegiatan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Alokasi anggaran : Rp580.995.000,00

Realisasi anggaran : Rp 470.130.850,00. (80,918)

Tingkat capaian : dilakukan 4 kali sosialisasi pemanfaatan tanah kas desa dan diterbitkan rekomendasi ke gubernur atas pemberian ijin tanah kas desa yang terdiri dari:

a) Sertifikasi tanah kas desa sebanyak 54 bidang

b) Rekomendasi Bupati ke Gubernur sebanyak 75 rekomendasi. dilakukan 4 kali sosialisasi pemanfaatan Tanah Kas Desa.

2) Pemberdayaan PPAT Kecamatan

Alokasi anggaran : Rp2.000.000,00

Realisasi anggaran : Rp2.000.000,00. (100%)

Tingkat capaian : Meningkatnya kapasitas dan profesionalitas PPAT kecamatan dan transformasi peraturan perundangan di bidang pertanahan.

3) Pensertifikatan dan Sewa Tanah Pemerintah Propinsi DIY

Alokasi anggaran : Rp192.030.000,00

Realisasi anggaran : Rp82.122.075.00.(42,675%)

Tingkat capaian :

a) Pensertifikatan Tanah

Berikut data status tanah di Kabupaten Bantul sampai dengan Tahun 2017 adalah:

LUAS WILAYAH KERJA DAN KEPEMILIKAN HAT

No	Uraian	Jumlah		Prosentase (%)	
		Bidang	Luas (m ²)	Bidang	Luas (m ²)
A	Kabupaten Bantul Rata-rata	629.836	506.850.000 805 m ² / bid	-	-
B	Tanah Terdaftar				
	1. HM	481.777	294.139.185	85,04	58,03
	2. HGB	19.126	7.282.095	3,38	1,44
	3. HP	3.243	8.727.115	0,57	1,72
	4. Wakaf	1.558	407.350	0,28	0,08
	5. Hak Lainnya (HPL, Sarusun)	11	2.433.413	0,002	0,48
	Jumlah	505.715	312.989.158	89,26	61,75
	Rata-rata per sertifikat		619 m ² / stpk		
C	Tanah belum terdaftar Rata-rata	124.121	193.860.842 1.561 m ² / bid	19,71	38,25
D	Jumlah Penduduk		955.015 jiwa		

b) Pembayaran sewa tanah kas desa sebanyak 3 bidang, yaitu:

(1) **Pasar Piyungan**

Dimana Pemda Kab Bantul Bagian Tata Pemerintahan menyewa tanah milik Pemda DIY yang digunakan untuk pasar Piyungan, Sekarang Pemda Kab Bantul menyewa sebesar Rp.33 jt, dan karena Dinas Perdagangan belum menganggarkan untuk sewa, maka sesuai dengan Rakor yang dilakukan, maka sewa tanah Pemda DIY untuk pasar Piyungan dibebankan di DPTR Bantul, dan dari hasil rakor tersebut juga disepakati bahwa sewa tanah Pemda DIY kedepannya di anggarkan oleh Dinas Perdagangan.

(2) **PT DonYoung**

Dikarenakan Sewa tanah kas desa Sitimulyo oleh Pemda Bantul dalam hal ini Bagian Pemdес belum menganggarkan, maka pada Tahun 2017 dari hasil rakor disepakati bahwa penganggaran oleh DPTR Bantul sebesar Rp.60.864.574,- Pada tahap selanjutnya bahwa perlu perbaikan perjanjian antara PT. Donyong dengan Pemerintah Desa, sehingga sewa tanah kas Desa Sitimulyo dibebankan pada PT Donyong dengan Pemerintah Desa.

(3) **SMA BAMBANGLIPURO**

Sewa tanah kas Desa oleh SMA Bambanglipuro disebabkan belum teranggarkan oleh Dikpora , hal ini dikarenakan terjadi pengambilan urusan pendidikan di tingkat SLTA oleh Prop DIY, maka Pemda Bantul harus menanggung beban

sewa SMA Bambanglipuro sebesar Rp. 1,3 jt. untuk yang akan datang sewa tanah yang ada di Kabupaten sudah menjadi tanggungjawab Dikpora Pemda DIY.

Tidak tercapainya realisasi keuangan dan fisik kegiatan tersebut disebabkan adanya perbedaan luasan tanah saat perencanaan dengan luasan tanah saat pengukuran, sehingga target biaya ukur, jumlah patok menjadi lebih kecil.

4) Pensertifikatan Tanah Warga (Proda)

Alokasi anggaran : Rp379.250.000,00
Realisasi anggaran : Rp233.279.560,00(61,511%)
Tingkat capaian : Terdaftarkannya tanah sebesar 400 bidang tanah warga di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul melalui program daerah dengan rincian sebagai berikut:

5) Pemanfaatan Tanah *Sultan Ground* (SG)

Alokasi anggaran : Rp22.600.000,00
Realisasi anggaran : Rp221.917.500,00 (96,980%)
Tingkat capaian : Jumlah kekancingan yang dimohonkan ijin kekancingan 14 bidang tanah

6) Penanganan Permasalahan Pertanahan

Alokasi anggaran : Rp18.950.000,00
Realisasi anggaran : Rp16.50.5000,00 (87,974%)
Tingkat capaian : Jumlah masalah yang tertangani sebanyak 5 kasus

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018		
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		eksemplar pembayaran surat kabar, Jumlah bulan pembayaran jasa internet, Jumlah Barang Cetak, Jumlah Belanja Penggandaan, Sampah terangkut, Partisipasi Pameran dan Karnaval, Spanduk, Papan Nama, Komsumsi Rapat								
1	03	01	37	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	rapat koordinasi dalam daerah, rapat koordinasi ke luar daerah, makan minum rapat, makan minum tamu	100	100	100	100	100
1	03	01	38	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	jumlah honor non PNS, honorarium kontrak ahli, tenaga operator komputer,	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018		
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	03 02 51	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan kursi putar dan printer	100	100	100	100	100	100	
1	03 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan sumber daya aparatur	100	100	100	100	100	100	
1	03 05 11	Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Bmtek	100	100	100	100	100	100	
1	03 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Nilai Evaluasi Kinerja	83	0	0	80	80	96,38	
1	03 06 05	Penyusunan laporan keuangan, barang dan kepegawaian	Tersusunnya Laporan keuangan, asset dan kepegawaian	13	0	0	13	13	100	
1	03 06 12	Pemutakhiran Data		1	0	0	1	1	100	
1	03 32	Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang	4	3	2	66,67	3	3	75
1	03 32 01	Penyusunan kebijakan	Ketersediaan dokumen	1	0	0	0	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018				
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
	tentang penyusunan rencana tata ruang	rencana tata ruang										
1	03	32	02	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Raperda RDTR	4	0	0	0	1	1	25
1	03	32	03	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Jumlah Sosialisasi	4	0	0	0	4	4	100
1	03	32	05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Dokumen rencana detail tata ruang kawasan	2	0	0	0	2	2	100
1	03	32	06	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Dokumen rencana detail teknis ruang kawasan	4	0	0	0	1	1	25
1	03	32	07	Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan	Penyusunan Dokumen RTBL	7	0	0	0	6	6	85.71
1	03	32	38	Studi tentang Tata Ruang	Dokumen Kajian RTH	1	0	0	0	1	1	100
1	03	34		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Prosentase pengendalian tata ruang	80	71	71	100	72	72	90

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018				
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1	03	34	01	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah Pengendalian yang ditangani	200	0	0	0	12	12	6
1	03	34	10	Pengembangan data pemanfaatan ruang	Sistem Aplikasi Pertanahan dan tata ruang	5	0	0	0	5	5	100
2	04	16		Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Cakupan sertifikasi tanah	100	84	84	100	88	88	88
2	04	16		Pemberdayaan PPAT kecamatan	Jumlah Pemberdayaan PPAT kecamatan	0	4	4	100	0	0	0
2	04	16	09	Inventarisasi tanah kas desa	Jumlah desa yang terinventarisir	75	75	75	100	75	75	100
2	04	16	14	Persetifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY	Bidang tanah sewa yang dibiayai pemda	50	8	8	100	75	75	100
2	04	16	16	Persetifikatan tanah warga (PRODA)	Jumlah sertifikat tanah warga	100	400	400	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018				
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
2	04	16	.17	Pemanfaatan Tanah SG	Jumlah rekomendasi	25	14	14	100	30	30	120
2	04	17		Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Angka penanganan konflik pertanahan	20	10	10	100	10	10	50
2	04	17	01	penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Koordinasi dan peninjauan lokasi	20	5	5	100	5	5	50

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, maka cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sesuai tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul.

Kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dapat dilihat capaian pelaksanaan tugas pokoknya, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang administrasi pertanahan dan penataan ruang. Untuk melihat hal tersebut, penilaian capaian kinerja difokuskan pada program utama yaitu:

- a. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah,
- b. Program Perencanaan Tata Ruang dan
- c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Berdasarkan data Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2017, realisasi capaian kinerja pada tahun 2017 dapat terlihat pada tabel:

. Tabel Evaluasi dan Analisis Kinerja

Program	Indicator Program	Target	Realisasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase sarana dan prasarana aparatur yg layak fungsi	100%	100%
Program Penataan Penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah	Persentase pensertifikatan tanah	84%	84%
Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya ketersediaan dokumen rencana tata ruang	3 dokumen	2 dokumen
Program Pengendalian dan pemanfaatan ruang	Prosentase penanganan pelanggaran	71%	100%

Sumber : esakip Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul

Berdasarkan Hasil pengukuran indikator Program tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian pengukuran kinerja termasuk kategori tinggi, yaitu sebesar 88,89 %. Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Pencapaian target kinerja untuk sertifikasi tanah pada tahun 2016 adalah 80 %. Sedangkan target yang ditetapkan tahun 2017 adalah 84% (target ini naik sebesar 4 %) dari nilai capaian sebelumnya, realisasi sebesar 84, tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Realisasi tersebut diperoleh dari Jumlah bidang tanah yang bersertifikat sebanyak 481.697 bidang tanah dibagi jumlah seluruh bidang tanah sebanyak 638.827 dikalikan 100%. Untuk saat ini tanah yang belum bersertifikat sebanyak 157.130 bidang tanah. Melalui program PTSL/PRODA/PRONA diharapkan setiap tahun dapat dilaksanakan pensertifikatan tanah sebanyak 2.500 bidang tanah. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100%. Capaian tahun 2017 ini telah menyumbangkan 84% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatnya pensertifikatan tanah. Pada tahun 2017, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini dari Program Penataan Penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah. Keberhasilan indikator program tersebut diukur dengan indikator Jumlah Pensertifikatan Tanah yang pada tahun 2017 menargetkan sebesar 84 % Terealisasi 84. Program tersebut didukung dengan kegiatan antara lain :

- Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- Pemberdayaan PPAT Kecamatan
- Persertifikatan dan sewa tanah Pemda DIY
- Persertifikatan tanah warga (PRODA)
- Pemanfaatan Tanah SG
- Penanganan permasalahan pertanahan

Untuk kegiatan pensertifikatan tanah warga melalui Proda Kabupaten Bantul tahun anggaran 2017 ada 400 bidang antara lain di Desa Selopamiro Kecamatan Imogiri, Desa Poncosari Kecamatan srandakan, Desa Gilangharjo Kec Pandak dan Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan. Dari 400 bidang target kegiatan, berkas pendaftaran sudah selesai semua dan sudah masuk ke kantor pertanahan dan

sudah didaftarkan guna mendapatkan sertifikat.

Strategi untuk mewujudkan dari indikator cakupan sertifikasi tanah pada tahun berikutnya dengan memberikan motivasi dan jempuk bola dilapangan.

Capaian Sasaran Meningkatnya pensertifikatan tanah di dukung dengan Program Program Penataan Penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah yang diampu oleh Bidang Pertanahan. Capaian Program ini ukur dengan indikator Persentase persertifikatan tanah pada tahun 2017 mentargetkan 84% terealisasi sebesar 84% dengan capaian sebesar 100%. Program tersebut didukung dengan satu kegiatan anata lain Persertifikatan tanah warga (PRODA)

Capaian kinerja yang sudah dicapai pada tahun 2016 ada 2 perda yaitu Perda RDTR Sewon, dan Perda RTRW, sedang capaian tahun 2017 menunjukkan hasil yang sedang. Target yang ditetapkan tahun 2017 adalah 3 dokumen tata ruang yang sudah diperdakan, realisasi sebanyak 2 dokumen, tercapai 66.67% atau bernilai kinerja Sedang. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebanyak 4 dokumen. Capaian tahun 2017 ini telah menyumbangkan 50% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Tahun 2017 mentargetkan sebanyak 3 dokumen Terealisasi 2 dokumen Program tersebut di dukung dengan kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang.

Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Penataan dan Pengelolaan Ruang di dukung dengan Program **Perencanaan Tata Ruang** yang diampu oleh Bidang Pengaturan dan Pemanfaatan Tata Ruang. Capaian Program ini diukur dengan indikator **Jumlah dokumen tata ruang** pada tahun 2017 mentargetkan 3 dokumen terealisasi sebesar 2 dokumen dengan capaian sebesar 66,67%. Program tersebut didukung dengan satu kegiatan antara lain Penyusunan Rencana Tata Ruang.

Capaian Kinerja Pengendalian Tata Ruang Tahun 2016 belum diukur dan Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang Sangat Tinggi. Target yang ditetapkan tahun 2017 adalah 71%, realisasi sebesar 71, tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 80%. Capaian tahun 2017 ini telah menyumbangkan 88.75% dari target akhir Renstra tahun 2021. Dari total wilayah di Kabupaten Bantul seluas 50.024,40 ha yang sesuai

dengan pemanfaatan ruang sebesar 35.602,66 ha. Dengan formulasi pengukuran jumlah luasan wilayah yang dikendalikan pemanfaatannya sesuai tata ruang di bagi jumlah luasan wilayah x 100%.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatkan kinerja penyelenggaran, pengawasan dan pengendalian. Pada tahun 2017, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini dari Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Keberhasilan indikator program tersebut diukur dengan prosentase penanganan pelanggaran.

Pada tahun 2017 mentargetkan sebesar 71% Terealisasi 71. Program tersebut di dukung dengan kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian pemanfaatan ruang.

Strategi

- Melakukan banyak kerjasama dengan pihak terkait, sosialisai ke masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang penataan dan pemanfaatan tata ruang.

Secara keseluruhan Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
A.												
1.	Cakupan dokumen tata ruang yang sudah di-perda-kan	2	2	2	2	4	2	2	2	2	4	
2.	Persentase efektifitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan tata ruang	71	72	75	77	80	71	72	75	77	80	
3.	Cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang	84	88	92	96	100	84	88	92	96	100	
4.	Angka penanganan konflik pertanahan	10	10	15	15	20	10	10	15	15	20	
5	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	80	82	81	82	83	80	82	81	82	83	
6	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
B.	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	n/a	100	100	100	100	n/a	100	100	100	100	
7	Nilai Evaluasi Kinerja	n/a	80	83	85	88	85	80	83	85	88	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul menyusun program kerja dan kegiatan dalam Rencana Strategis yang memuat tugas pokok dan fungsi dan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Dalam RPJMD tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mendukung pencapaian misi:

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan bebas dari KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas

- b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran
Meningkatnya sarana prasarana pelayanan pertanahan dan pengelolaan Ruang	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat
Meningkatnya Penataan dan Pengelolaan Ruang Yang Partisipatif, serasi dan berkelanjutan	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang
Meningkatnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan ruang	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub bab ini berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu:

- a. membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan
- c. penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

TABEL. 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

No	Program/Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
0103	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kab. Bantul			3,121,715,000	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kab. Bantul			4,955,000,000	
32	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Kab. Bantul			1,362,600,000	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Kab. Bantul			2,955,000,000	
001	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Kab. Bantul	Raperda RTRW	1 dokumen	168,800,000	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Kab. Bantul	Raperda RTRW	1 dokumen	100,000,000	
002	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Kab. Bantul	tersedianya dokumen Raperda RDTR	1 dokumen	149,750,000	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Kab. Bantul	tersedianya dokumen Raperda RDTR	1 dokumen	300,000,000	
003	Sosialisasi peraturan perundang- undangan tentang rencana tata ruang	Kab. Bantul	Sosialisasi peraturan perundang undangan tentang rencana tata ruang tingkat desa	4 kali	60,300,000	Sosialisasi peraturan perundang- undangan tentang rencana tata ruang	Kab. Bantul	Sosialisasi peraturan perundang undangan tentang rencana tata ruang tingkat desa	4 kali	80,000,000	
006	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Kab. Bantul	Dokumen rencana ruang teknis kawasan strategis kabupaten	2 dokumen	154,250,000	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Kab. Bantul	Dokumen rencana ruang teknis kawasan strategis kabupaten	2 dokumen	300,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
007	Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan	Kab. Bantul	Dokumen RTBL dan Masterplan (Rencana Induk)	9 dokumen	775,325,000	Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan	Kab. Bantul	Dokumen RTBL dan Masterplan (Rencana Induk)	9 dokumen	2,100,000,000	
038	Studi tentang Tata Ruang	Kab. Bantul	Dokumen Kajian RTH	1 dokumen	54,175,000	Studi tentang Tata Ruang	Kab. Bantul	Dokumen Kajian RTH	1 dokumen	75,000,000	
34	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Kab. Bantul			1,759,115,000	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Kab. Bantul			2,000,000,000	
001	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Kab. Bantul	Dokumen pengendalian pemanfaatan	1 dokumen	839,360,000	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Kab. Bantul	Dokumen pengendalian pemanfaatan	1 dokumen	1,000,000,000	
010	Pengembangan data pemanfaatan ruang	Kab. Bantul	Data dan informasi	1 dokumen	461,950,000	Pengembangan data pemanfaatan ruang	Kab. Bantul	Data dan informasi	1 dokumen	500,000,000	
011	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Kab. Bantul	Peta Citra Tegak, Digitalisasi audit pemanfaatan ruang tahun 2018, Pendataan Aset PSU	2 aplikasi	457,805,000	PERTANAHAN	Kab. Bantul	Peta Citra Tegak, Digitalisasi audit pemanfaatan ruang tahun 2018, Pendataan Aset PSU	2 aplikasi	500,000,000	
0204	PERTANAHAN	Kab. Bantul			3,092,327,343		Kab. Bantul			3,192,260,000	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kab. Bantul		92%	1,533,682,343	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kab. Bantul		92%	1,380,000,000	
036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah pelayanan	15 jenis	473,034,343	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah pelayanan	15 jenis	480,000,000	
037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah Koordinasi	400 kali	739,648,000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah Koordinasi	400 kali	600,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul	Upah Tenaga Harian Lepas	140ob	321,000,000	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul	Upah Tenaga Harian Lepas	140ob	300,000,000	
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kab. Bantul		100%	1,144,680,000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kab. Bantul		100%	1,203,205,000	
022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Bantul	Terpeliharanya gedung kantor, pagar, halaman dan tempat parkir	4 jenis	324,150,000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Bantul	Terpeliharanya gedung kantor, pagar, halaman dan tempat parkir	4 jenis	250,000,000	
024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Bantul	Jumlah belanja BBM, suku cadang dan jasa servis, dan pajak kendaraan	17 kendaraan	169,680,000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Bantul	Jumlah belanja BBM, suku cadang dan jasa servis, dan pajak kendaraan	17 kendaraan	162,415,000	
030	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	13 jenis	45,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	13 jenis	55,000,000	
051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Pengadaan komputer, printer, kursi rapat, almari es, drone, cors, kamera dan sound sistem	20 jenis	605,850,000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Pengadaan komputer, printer, kursi rapat, almari es, drone, cors, kamera dan sound sistem	20 jenis	735,790,000	Perubahan volume
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Kab. Bantul		92%	138,625,000	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN	Kab. Bantul		92%	209,500,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						KEUANGAN					
008	Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan	Kab. Bantul	kinerja laporan keuangan, barang, dan kepegawaian	12 bulan	124,425,000	Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan	Kab. Bantul	kinerja laporan keuangan, barang, dan kepegawaian		159,500,000	
012	Pemutakhiran Data	Kab. Bantul	Arsip tersimpan dalam bentuk digital	11 seksi	14,200,000	Pemutakhiran Data	Kab. Bantul	Arsip tersimpan dalam bentuk digital		50,000,000	
16	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Kab. Bantul			238,390,000	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Kab. Bantul			343,305,000	
009	Inventarisasi tanah kas desa	Kab. Bantul	Data tanah kas desa		36,350,000	Inventarisasi tanah kas desa	Kab. Bantul	Data tanah kas desa		52,600,000	
014	Persetifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY	Kab. Bantul	dokumen pendataan tanah pemerintah, sertifikat dan sewa tanah		129,890,000	Persetifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY	Kab. Bantul	dokumen pendataan tanah pemerintah, sertifikat dan sewa tanah		172,100,000	
017	Pemanfaatan Tanah SG	Kab. Bantul	Permohonan surat kekancingan dan Rekomendasi Ijin Gubernur		72,150,000	Pemanfaatan Tanah SG	Kab. Bantul	Permohonan surat kekancingan dan Rekomendasi Ijin Gubernur		118,605,000	
17	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK- KONFLIK PERTANAHAN	Kab. Bantul		100%	36,950,000	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK- KONFLIK PERTANAHAN	Kab. Bantul			56,250,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
001	penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Kab. Bantul	Koordinasi dan peninjauan lokasi	5 masalah	36,950,000	penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Kab. Bantul	Koordinasi dan peninjauan lokasi		56,250,000	
	jumlah									8,147,260,000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Usulan-usulan tersebut disajikan dalam tabel.berikut:

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2018 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembuatan DED Kecamatan Jetis	Kecamatan Jetis	Dokumen	1 (Satu)	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2019 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

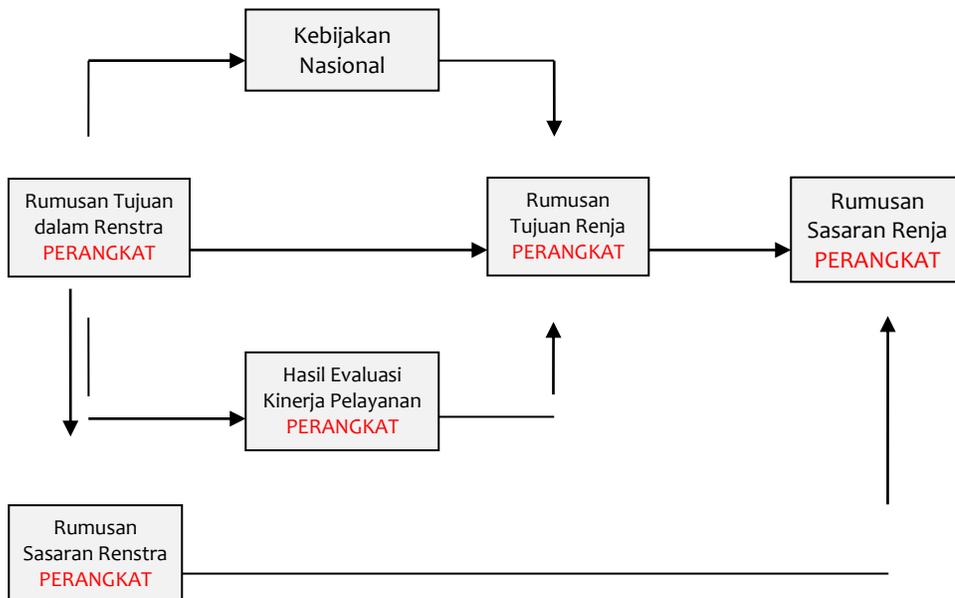
1. pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;
4. pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan
5. stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Dalam bidang Penataan ruang untuk mendukung prioritas nasional kesatu dan kedua, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang maka sasaran-sasaran yang perlu dicapai yakni tersusunnya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis provinsi dan kabupaten/kota, terselenggaranya konsultasi dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis provinsi dan kabupaten.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah, mengacu pada alur pikir sebagai berikut:

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH



Dalam hal ini Dinas Tata Ruang dan Pertanahan juga memiliki tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan pada tahun 2019 yang dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan pengelolaan Ruang	Meningkatnya pensertifikatan tanah
Meningkatkan efektifitas Penataan dan Pengelolaan Ruang Yang Partisipatif, serasi dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas penataan dan pengelolaan Ruang
Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan ruang	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian

Guna tercapainya tujuan dan sasaran maka diperlukan kebijakan yang pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/pegangan/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi dinas. Berikut disajikan Kebijakan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bantul dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan:

- a. Peningkatan Pelayanan Dinas
- b. Peningkatan Capaian Kinerja Dinas
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk perencanaan ruang
- d. Peningkatan tertib pemanfaatan ruang
- e. Peningkatan pengendalian dan pengawasan ruang sesuai dengan rencana tata ruang
- f. Meningkatkan keakuratan data base pertanahan
- g. Menyelesaikan target 100% pensertifikatan tanah dengan mendukung program pemerintah PTSL yang dilakukan BPN

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk tahun 2019, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang akan menjalankan 2 (dua) Urusan dengan mengusulkan 7 (tujuh) Program dan 22 (dua puluh dua). Program dan kegiatan tahun 2019 secara rinci disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				3,121,715,000				4,225,000,000
0103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				3,121,715,000				4,225,000,000
0103.32	Program Perencanaan Tata Ruang	1 : Dokumen Tata Ruang Yang Sudah Diperdakan		dokumen	1,362,600,000			0 dokumen	1,975,000,000
0103.020401.32.001	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Keluaran : Raperda tentang RTRW Hasil : Tersedianya dokumen tentang RTRW	Kabupaten Bantul	1 dokumen	168,800,000	APBD Kabupaten/Kota		1 dokumen	120,000,000
0103.020401.32.002	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Keluaran : Raperda tentang RDTR Hasil : Tersedianya 2 Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	2 dokumen	149,750,000	APBD Kabupaten/Kota		3 dokumen	250,000,000
0103.020401.32.003	Sosialisasi peraturan perundang- undangan tentang rencana tata ruang	Keluaran : Sosialisasi tentang Peraturan Perundang-undangan Tentang Rencana Tata Ruang Hasil : Sosialisasi Perda RDTR di 3 Desa (Kecamatan Sewon dan Kecamatan Kasihan)	Kabupaten Bantul	3 kali	60,300,000	APBD Kabupaten/Kota		6 kali	70,000,000
0103.020401.32.006	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Keluaran : Dokumen Rencana Teknis Ruang Hasil : Tersedianya 2 Dokumen Rencana Teknis Ruang	Kabupaten Bantul	2 dokumen	154,250,000	APBD Kabupaten/Kota		4 dokumen	250,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0103.020401.34.011	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Keluaran : Digitalisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Keluaran : Digitalisasi Audit Pemanfaatan Ruang Keluaran : Pendataan Aset Penyerahan Prasarana Sarana Dan Utilitas (PSU) Perumahan di 6 Kecamatan Keluaran : Penyusunan Konsep dan Perancangan Fasad sebagai Citra Kota Jl Jenderal Sudirman Hasil : Tersedianya data Pemanfaatan Ruang	Kabupaten Bantul	1 dokumen 1 dokumen 6 dokumen 1 dokumen 8 dokumen	457,805,000	APBD Kabupaten/Kota		1 dokumen 1 dokumen 6 dokumen 1 dokumen 8 dokumen	750,000,000
02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				3,092,327,343				10,270,850,000
0204	Pertanahan				3,092,327,343				10,270,850,000
0204.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 : Capaian Nilai AKIP		0 84	1,533,682,343			0 84	8,605,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0204.020401.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Keluaran : Jumlah ATK Kegiatan Keluaran : Jumlah alat listrik dan elektronika Keluaran : Jumlah meterai Keluaran : Jumlah peralatan kebersihan Keluaran : Jumlah pengisian tabung Keluaran : Jumlah pembelian bendera Keluaran : Jumlah pembayaran telepon Keluaran : Jumlah pembayaran air Keluaran : Jumlah pembayaran listrik Keluaran : Jumlah pembayaran surat kabar Keluaran : Jumlah pembayaran internet Keluaran : terlaksananya publikasi	Kabupaten Bantu	7 pogram,24 keg 11 jenis 1600 lembar 14 Jenis 15 kali 2 buah 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 4 kali	473,034,343	APBD Kabupaten/Kota		7 pogram, 24keg 11 jenis 1600 lembar 14 Jenis 15 kali 2 buah 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 4 kali	450,000,000
0204.020401.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Keluaran : Perjalanan Dinas dalam daerah Keluaran : Perjalanan Dinas Luar daerah Keluaran : Jumlah jamuan rapat Keluaran : Jumlah Jamuan Tamu	Kabupaten Bantul	1168 kali 240 kali 3300 dos 250 dos	739,648,000	APBD Kabupaten/Kota		1168 kali 240 kali 3300 dos 250 dos	7,800,000,000
0204.020401.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Keluaran : Jumlah honor Tenaga kontrak	Kabupaten Bantul	12 Bulan	321,000,000	APBD Kabupaten/Kota		0 Bulan	355,000,000
0204.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		77 Persen	1,144,680,000			80 Persen	1,155,850,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0204.020401.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Keluaran : Penggantian Jaringan Listrik Keluaran : Pemeliharaan Halaman dan taman Keluaran : Terpeliharanya Pagar Keluaran : Terpeliharanya Gedung	Kabupaten Bantul	1 unit 1 unit 1 unit 4 unit	324,150,000	APBD Kabupaten/Kota		1 unit 1 unit 1 unit 4 unit	250,000,000
0204.020401.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah BBM Keluaran : Perpanjangan Surat- surat kendaraan dinas Keluaran : Jumlah penggantian suku cadang dan servis	Kabupaten Bantul	9000 liter 19 unit 19 unit	169,680,000	APBD Kabupaten/Kota		9000 liter 19 unit 19 unit	210,000,000
0204.020401.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : Alat kantor terjaga fungsinya	Kabupaten Bantul	100 persen	45,000,000	APBD Kabupaten/Kota		100 persen	55,000,000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0204.020401.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Keluaran : Peralatan kantor	Kabupaten Bantul	20 jenis	605,850,000	APBD Kabupaten/Kota		0 jenis 0 persen	640,850,000
0204.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 : Cakupan Nilai Evaluasi Kinerja		0 Angka	138,625,000			0 Angka	170,000,000
0204.020401.06.008	Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan	Keluaran : Jumlah honor pengelola keuangan Keluaran : Jumlah jasa konsultansi	Kabupaten Bantul	12 bulan 1 dokumen 80 Nilai kinerja	124,425,000	APBD Kabupaten/Kota		0 bulan 0 dokumen 0 Nilai kinerja	150,000,000
0204.020401.06.012	Pemutakhiran Data	Keluaran : Jumlah arsip digital	Kabupaten Bantul	11 seksi 100 %	14,200,000	APBD Kabupaten/Kota		0 seksi 0 %	20,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0204.16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1 : Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang		92%	238,390,000			95%	295,000,000
0204.020401.16.009	Inventarisasi tanah kas desa	Keluaran : Jumlah data base terupdate Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi	Kabupaten Bantul	75 desa 200 orang 1 persen	36,350,000	APBD Kabupaten/Kota		0 desa 0 orang 1 persen	45,000,000
0204.020401.16.014	Persetifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY	Keluaran : Jumlah pendaftaran berkas dan pembayaran ke Kantor Pertanahan Keluaran : Sosialisasi	Kabupaten Bantul	64 bidang 200 orang 64 bidang	129,890,000	APBD Kabupaten/Kota		50 bidang 0 orang 50 bidang	160,000,000
0204.020401.16.017	Pemanfaatan Tanah SG	Keluaran : Permohonan surat kekancingan/Rekomendasi Bupati	Kabupaten Bantul	20 dokumen 20 dokumen	72,150,000	APBD Kabupaten/Kota		20 dokumen 20 dokumen	90,000,000
0204.17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	1 : Penanganan konflik pertanahan		100%	36,950,000			100%	45,000,000
0204.020401.17.001	penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Keluaran : Jumlah permasalahan pertanahan yang ditangani / difasilitasi Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi konflik pertanahan	Kabupaten Bantul	10 buah 200 orang 10 permasalahan	36,950,000	APBD Kabupaten/Kota		15 buah 0 orang 15 permasalahan	45,000,000

BAB V

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2019. Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2019. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2019. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.


BUPATI BANTUL
SUHARSONO